EDISI JUMAT 23 OKTOBER 2026

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY



Tol Semarang-Batang Dikepung Asap

Sejumlah kendaraan melaju perlahan saat melintasi ruas Tol Semarang-Batang KM 377A yang terdampak asap kebakaran lahan di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (22/10/2026). Hal ini sangat menggangu jarak pandang bagi pengendara mobil di jalan tol tersebut. Disebut, Manajemen KEK Industropolis Batang mengimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan dan pengguna jalan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. (Ant ist)

SEPUPU TAK INGAT KULIAH JOKOWI

DUMATNO BUDI UTOMO MENGAKU HANYA DENGAR DARI OBROLAN KELUARGA

Polemik ijazah Joko Widodo ternyata belum usai. Kini memasuki babak baru dalam sidang perkara dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Dumatno Budi Utomo, sepupu Jokowi, mengaku tidak mengetahui langsung proses perkuliahan mantan presiden itu di Universitas Gadjah Mada (UGM). Informasi yang ia ketahui, kata dia, sebatas obrolan keluarga. Dumatno juga mengaku belum pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung, meski menyebut tahun kelulusan 1985 dan mengidentifikasi foto pada dokumen yang ditunjukkan di persidangan sebagai foto Jokowi.Pada sidang yang sama, Dian Sandi Utama mengungkap asal-usul foto ijazah yang diunggahnya ke media sosial X pada 1 April 2025. Ia mengaku mengunduh gambar dari komentar akun anonim bernama Hyperpoison sekitar 10–15 detik setelah komentar itu muncul, kemudian mengunggahnya kembali tanpa mengubah gambar. Dian menyatakan belum pernah melihat ijazah fisik Jokowi. Namun, ia mengaku meyakini keaslian dokumen berdasarkan informasi Andi Pramaria, yang disebutnya teman kuliah Jokowi, dokumentasi foto yang diterima pada 2022, keterangan UGM, serta pencocokan gambar dengan tayangan reuni UGM di YouTube. Sementara itu, Dokter Tifa mempersoalkan belum ditampilkannya ijazah asli dalam persidangan dan ketidakhadiran Jokowi sebagai pelapor. Kuasa hukumnya juga memprotes pengaturan waktu pemeriksaan saksi. Di luar keterangan para pihak, UGM telah menyatakan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan sejak 1980 dan lulus pada 5 November 1985. **BERITA SELENGKAPNYA DI HAL11.....**

22 Oktober 2026

Sidang ke-10 Dokter Tifa digelar di PN Jaktim dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa. Dokter Tifa menyatakan kekecewaannya karena dokumen ijazah asli Jokowi selaku pelapor belum kunjung dihadirkan di persidangan.

17 September 2026

Sidang pokok perkara kembali berjalan bergantian. Sidang Dokter Tifa beragenda pembacaan eksepsi baru, dilanjutkan sidang pembacaan dakwaan untuk Roy Suryo.

27 Agustus 2026

Sidang dakwaan ulang digelar menggunakan berkas dakwaan yang telah disempurnakan oleh JPU.

29 Juli 2026

Majelis hakim sempat memutus dakwaan awal batal demi hukum lewat putusan sela. Namun, JPU memilih memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkan ulang perkara tanpa mengajukan perlawanan.

9 Juli 2026

Dokter Tifa mengajukan nota keberatan (eksepsi) dalam persidangan.

Peristiwa / Kronologi Hukum

2 Juli 2026

Sidang perdana Dokter Tifa digelar di PN Jaktim dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

26 Juni 2026

Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menyatakan berkas perkara lengkap dan menetapkan jadwal sidang perdana Dokter Tifa.

13 November 2025

Pemeriksaan perdana terhadap para tersangka. Total ada 8 orang tersangka yang dibagi menjadi dua klaster penuntutan.

30 April 2025

Pihak Jokowi resmi melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Total masuk 6 laporan (4 naik ke penyidikan, 2 dicabut)

22 April - 21 Mei 2025

Ditemukan lagi 28 unggahan serupa di media sosial yang terus menyerang kehormatan Jokowi dengan tudingan ijazah palsu.

15 April 2025

Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar konferensi pers resmi dan menegaskan secara sah bahwa Jokowi adalah alumnus yang lulus dari kampus tersebut.

26 Maret 2025

Ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, menemukan unggahan media sosial milik Dokter Tifa yang menuduh ijazah S1 Jokowi palsu.

PEMBAGIAN KLASTER TERSANGKA

(Total 8 Orang)

Klaster 1

Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah (dijerat Pasal 310/311/160 KUHP serta UU ITE).

Klaster 2

Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma (dijerat Pasal 310/311 KUHP serta Pasal 32/48/35/51 UU ITE atas dugaan manipulasi/pemotongan dokumen elektronik ijazah).



02 GOVERMENTTODAY
Prabowo Klaim Ekonomi RI Masuk Tujuh Besar Dunia

05 NUSANTARA
2 Prajurit Diduga Terlibat Korupsi Dana Bencana, KPK Tunggu Respons Panglima TNI

10 LISTSTYLE
Sisir Kotor Bisa Bikin Rambut Lepek dan Kulit Kepala Gatal

PRABOWO KLAIM EKONOMI RI MASUK TUJUH BESAR DUNIA

Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI) di tengah gejolak pasar modal Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo menuding lembaga penyedia indeks saham global itu berusaha menakut-nakuti Indonesia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), Prabowo menilai posisi tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi Indonesia.

"Baru saja IMF mengeluarkan daftar urutan ekonomi terbesar di dunia dari PPP, purchasing power parity, berarti kemampuan daya beli nyata dari ekonomi banyak negara. Indonesia hari ini ditempatkan dalam urutan ketujuh di dunia," kata Prabowo.

Berdasarkan proyeksi World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2026, nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan PPP mencapai sekitar 5,5 triliun dolar internasional.

Pengukuran PPP memperhitungkan perbedaan tingkat harga antarnegara sehingga dapat digunakan untuk membandingkan volume aktivitas ekonomi secara lebih setara. Namun, peringkat tersebut tidak serta-merta menggambarkan besarnya pendapatan setiap penduduk ataupun pemerataan kesejahteraan.

Prabowo mengakui bahwa kekayaan sumber daya alam dan kapasitas ekonomi Indonesia belum otomatis membuat seluruh masyarakat menikmati hasil pembangunan. "Kita kuat, kita kaya. Tapi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita kelola itu supaya bisa dirasakan langsung oleh rakyat kita yang paling memerlukan," ujarnya.

Ia menyoroti distribusi manfaat ekonomi yang dinilai masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. "Selama ini ekonomi hanya dinikmati oleh kurang dari 1 persen di atas," kata Prabowo.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ketimpangan pengeluaran penduduk masih menjadi persoalan. Pada Maret 2026, rasio Gini Indonesia tercatat 0,368, naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363.

Berdasarkan ukuran Bank Dunia, kelompok 40 persen penduduk terbawah menguasai 19,22 persen distribusi pengeluaran nasional. Angka tersebut menunjukkan bahwa capaian ekonomi makro perlu dibaca bersama distribusi manfaatnya di tingkat rumah tangga.



Presiden Prabowo Subianto (tengah) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).(BPMI Setpres)

Di sisi lain, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025. Garis kemiskinan nasional pada periode yang sama mencapai Rp669.235 per kapita per bulan.

Data tersebut memperlihatkan kemiskinan terus menjadi tantangan meski indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif. Pengukuran kemiskinan nasional ini menggunakan standar kebutuhan minimum untuk hidup layak dan tidak dapat disamakan langsung dengan garis kemiskinan internasional Bank Dunia.

Untuk memperluas akses ekonomi, Prabowo menyebut pemerintah telah menyalurkan kredit sekitar Rp53 triliun yang menjangkau kurang lebih dua juta keluarga. Pemerintah menargetkan penyaluran hingga Rp400 triliun pada tahun berikutnya bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

Menurut Prabowo, kapasitas penyaluran tersebut masih dapat ditingkatkan jika pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara optimal.

"Itu kemampuan kita sekarang. Tetapi kalau kita bisa mengamankan sumber-sumber alam kita yang sangat luar biasa, berarti kemampuan kita akan lebih," ujarnya.

Dalam pemberitaan terpisah, target Rp400 triliun itu disebut berpotensi menjangkau sekitar 28 juta keluarga atau lebih dari 100 juta jiwa dengan asumsi empat anggota per keluarga.

Sementara itu, laporan lain menyebut target jangkauan sekitar 48 juta keluarga. Perbedaan angka tersebut belum dijelaskan dalam bahan yang tersedia sehingga perlu diklarifikasi kepada pemerintah sebelum digunakan sebagai angka final.(gus,rls,ist/dya)

Cari Gubernur Jabar KDM, Singgung Tepuk Tangan untuk Sherly Tjoanda

Presiden Prabowo Subianto sempat mencari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Prabowo berkelakar kepala daerah yang lokasinya paling dekat dengan Jakarta justru tidak hadir. Namun, Dedi saat itu tengah menuju kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan untuk memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Momen tersebut terjadi ketika Prabowo menyapa para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menghadiri acara. Saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Prabowo menanyakan keberadaan Dedi. "Ke mana KDM itu?" tanya Prabowo. Ia kemudian berkomentar, "Yang paling deket enggak hadir, pasti sibuk."

Prabowo juga mengatakan, "Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk. Oke."

Ketidakhadiran Dedi berkaitan dengan kebakaran di kawasan Resor Pasawahan, Taman Nasional Gunung Ciremai, yang dilaporkan terjadi sejak Rabu (21/10) malam. Pada Kamis, Dedi bertolak ke lokasi untuk memimpin langsung upaya penanganan bersama petugas di lapangan.

Kebakaran di kawasan konservasi tersebut menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, terutama untuk mengendalikan api dan mencegah kerusakan lebih luas pada ekosistem taman nasional.

Setelah menanyakan Dedi, Prabowo melanjutkan agenda menyapa para pejabat daerah yang hadir. Ia menyebut Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam X, kemudian menyapa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Melihat penampilan Emil yang kini berjenggot, Prabowo melontarkan komentar, "Udah pake jenggot kau. O iya, ya, ya."

Interaksi tersebut menambah suasana santai dalam forum yang membahas percepatan akses keuangan daerah.

Prabowo juga menyoroti sambutan peserta terhadap Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ketika Sherly mendapat tepuk tangan meriah, Presiden berkelakar, "Kalau Gubernur Maluku Utara selalu paling banyak tepukannya."

Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian dalam acara yang dihadiri sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan sektor keuangan.

Prabowo meyakinkan para kepala daerah untuk tidak mengkhawatirkan perihal pemangkasan transfer dana ke daerah (TKD) dan menyatakan jumlahnya akan lebih besar dibandingkan sebelumnya. (wid,ant,kum/dya)

DIM RUU MIGAS BELUM KE DPR, BOLA MASIH DI TANGAN BAHLIL

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) belum berlanjut ke tahap pembahasan bersama DPR karena pemerintah belum menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada parlemen. Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menargetkan dokumen tersebut rampung pada 22 Oktober 2026.

Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng mengatakan DPR masih menunggu perkembangan penyerahan DIM dari pemerintah. Hingga Kamis (22/10/2026), ia mengaku belum memperoleh informasi terbaru mengenai dokumen tersebut.

"Saya belum ada kabar dari komisi," kata Mekeng, Kamis (22/10/2026).

Mekeng mengatakan DPR belum menjadwalkan koordinasi lanjutan karena prosesnya masih bergantung pada pemerintah. "Tidak ada, karena sifatnya kita (DPR) menunggu saja," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pemerintah telah menyiapkan DIM RUU Migas. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk diproses lebih lanjut sebelum disampaikan kepada DPR.

Yuliot menjelaskan penyusunan DIM melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Sekretariat Negara. Dokumen itu juga telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

"Jadi ini sudah dilakukan untuk pembahasan untuk DIM dan juga ini sudah disampaikan ke Pak Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dan itu kita segera untuk menyelesaikan ini proses DIM itu untuk disampaikan ke DPR," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (22/10/2026).

Yuliot sebelumnya menargetkan DIM rampung pada 22 Oktober 2026. Target tersebut mengacu pada Surat Presiden (Surpres) Prabowo Subianto yang diterima Bahlil pada 14 September 2026. Melalui surat itu, Menteri ESDM ditugaskan mengoordinasikan penyusunan DIM bersama kementerian dan lembaga terkait.

Namun, penyelesaian dokumen di lingkungan pemerintah belum otomatis membuat pembahasan bersama DPR dapat dimulai. Hingga Kamis, keterangan yang tersedia menunjukkan DIM telah disiapkan dan berada dalam proses koordinasi di tingkat pemerintah, sedangkan DPR masih menunggu penyerahan resminya.

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2026, Bahlil menyebut penyusunan



Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia.

DIM telah mencapai sekitar 80–90 persen. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

"Migas hari ini sudah hampir final dalam pertemuan dengan panitia yang melakukan ini di eksekutif. DIM-nya juga sudah hampir selesai. Sudah sekitar 80 persen, 90 persen," ujar Bahlil, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM.

Salah satu isu penting dalam revisi UU Migas adalah rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Menurut Bahlil, keberadaan BUK akan diatur dalam undang-undang, sedangkan sejumlah ketentuan teknis dapat diperinci melalui peraturan turunan, termasuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

"Karena undang-undang itu menyatakan BUK (Badan Usaha Khusus) nantinya. Tidak semua hal kan kita cantumkan di undang-undang. Ada PP (Peraturan Pemerintah)," kata Bahlil.

Rencana pembentukan BUK menjadi salah satu pokok penting karena berkaitan dengan penataan kelembagaan dan pengelolaan sektor hulu migas. Dilaporkan bahwa badan tersebut direncanakan menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Namun, Bahlil belum merinci bentuk kelembagaan maupun mekanisme operasional BUK tersebut.

Komisi XII DPR sebelumnya juga menyoroti pentingnya penguatan landasan hukum BUK dalam revisi UU Migas. Dalam kunjungan kerja di Balikpapan pada 21 Agustus 2026, Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto menyebut kejelasan kelembagaan dibutuhkan untuk memperkuat kepastian hukum pengelolaan sektor hulu migas dan memperjelas kewenangan pengambilan keputusan. (gus,ist,kcm/dya)

Diminta Cabut Konsesi Tambang Mangkrak 2 Tahun

PRESIDEN Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin konsesi tambang yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun. Pemerintah juga membuka kemungkinan menghentikan ekspor gas ke negara tetangga demi memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri. Dua kebijakan ini mengemuka di tengah arahan Prabowo agar pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dalam kondisi yang ia sebut sebagai survival atau bertahan.

Instruksi pencabutan izin disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta Utara, Kamis (22/10/2026). Ia meminta Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menertibkan konsesi yang dibiarkan tanpa kegiatan operasional. "Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM lebih dari dari tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" kata Prabowo.

Prabowo mencontohkan konsesi di wilayah Maluku Barat Daya dan Tanimbar yang menurutnya telah diberikan selama 28 tahun, tetapi tidak dikerjakan. Ia menilai pemberian izin pada masa lalu tidak selalu diikuti pemeriksaan memadai terhadap kemampuan pemegang konsesi untuk menjalankan kegiatan pertambangan. Akibatnya, potensi sumber daya alam tidak segera memberikan manfaat bagi negara.

"Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan," ujar Prabowo.

Ia juga menyoroti pemegang konsesi yang diduga hanya menjadikan izin sebagai instrumen spekulasi atau untuk kepentingan di pasar saham, tanpa mengembangkan kegiatan pertambangan di lapangan.

Di sektor energi, Bahlil membuka peluang tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga. Pernyataan itu disampaikan setelah Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026), meminta jajaran pemerintah menerjemahkan situasi survival ke dalam kebijakan sesuai bidang masing-masing.

Bahlil menilai pemenuhan kebutuhan domestik harus menjadi prioritas ketika Indonesia menghadapi tekanan. "Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival kan, harus penuhi kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil.

Pernyataan tersebut masih berupa kemungkinan kebijakan, bukan pengumuman bahwa kontrak ekspor gas telah diputus atau dihentikan.

Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan pemerintah agar menjaga sumber daya alam Indonesia dari kebocoran yang merugikan kepentingan nasional. Ia mengibaratkan sumber daya tersebut seperti darah yang menopang tubuh. Jika terus bocor, menurutnya, tubuh tidak akan mampu bertahan. Karena itu, pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan kebutuhan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan. (tin,ist/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan TODAY

PEMERINTAH SIAPKAN RP1,28 T BUKA REKENING 25 JUTA WARGA MISKIN

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk membuka rekening bank bagi 25 juta warga berusia di atas 17 tahun yang masuk kelompok kesejahteraan terbawah. Melalui program Satu Orang Satu Rekening, pemerintah memberikan setoran awal Rp50.000 per rekening dan menargetkan inklusi keuangan nasional mendekati 99 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran itu disiapkan untuk warga yang masuk desil 1 hingga 4, yakni kelompok 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan pengelompokan sosial ekonomi.

"Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan anggarannya Rp1,28 triliun," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Data calon nasabah disiapkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemerintah sebelumnya juga merancang mekanisme pembukaan rekening berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi digital yang disiapkan kedua bank tersebut.

Airlangga menyebut rekening itu nantinya tidak hanya digunakan untuk menyimpan uang, tetapi juga mendukung penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah lainnya. "Nah, ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening," ujarnya.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan inklusi keuangan dari kisaran 93 persen menjadi mendekati 99 persen. Namun, kepemilikan rekening tidak serta-merta menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami atau memanfaatkan layanan keuangan secara optimal.

Data menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan tercatat 69,57 persen. Selisih tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap layanan keuangan masih perlu diikuti peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan.

Program ini juga mengalami perubahan skala dibandingkan rencana awal yang disampaikan pemerintah pada September 2026. Saat itu, Airlangga memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening bagi lebih dari 200 juta penduduk, dengan setoran awal Rp50.000 per rekening. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ketika itu menyatakan kebutuhan anggaran tersebut belum final. Dalam pengumuman terbaru, pemerintah menyebut sasaran tahap yang disiapkan sebanyak 25 juta warga dengan anggaran Rp1,28 triliun.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Meski demikian, masih ada rincian yang perlu diperjelas, terutama mekanisme penetapan penerima, jadwal pelaksanaan, serta komponen penggunaan anggaran. Setoran awal Rp50.000 untuk 25 juta rekening secara matematis membutuhkan Rp1,25 triliun, atau Rp30 miliar lebih rendah daripada anggaran Rp1,28 triliun yang diumumkan pemerintah. Belum ada penjelasan terperinci dalam keterangan yang disampaikan mengenai alokasi selisih tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, gagasan program ini bermula dari evaluasi Presiden Prabowo terhadap aktivitas ekonomi masyarakat daerah yang belum seluruhnya tercatat dalam sistem perbankan formal. Menurut Tito, kondisi tersebut membuat perputaran uang di daerah belum sepenuhnya tergambar dalam data ekonomi regional.(tin, ist,ant/dya)

PERBANDINGAN PENDUDUK TANPA REKENING DAN TARGET PROGRAM PEMERINTAH

Penduduk Tanpa Rekening (Unbanked)
Jumlah / Target
± 46,5 juta orang
Data LPS (turun dari 49,7 juta pada Tahun 2025)

Usia Produktif Tanpa Rekening
Jumlah / Target
15,3 juta orang
Kelompok usia produktif yang belum tersentuh layanan perbankan

Target Rekening Baru Pemerintah
Jumlah / Target
200 juta rekening
Program nasional berbasis NIK/KTP untuk integrasi bansos & QRIS

Sumber Data:
Lembaga Penjamin Simpanan (GoodStats)

OJK: Waspadai Rekening Dormant hingga Judol

RENCANA pemerintah membuka rekening bagi 25 juta warga berpenghasilan rendah menjadi pekerjaan rumah bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di satu sisi, program ini ditujukan memperluas inklusi keuangan. Di sisi lain, rekening yang tidak aktif atau dormant berisiko disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, rekening yang lama tidak digunakan rentan dimanfaatkan pihak lain apabila pemiliknya tidak menjaga informasi keamanan, seperti nomor PIN. Risiko serupa juga mengintai rekening tabungan pelajar jika tidak disertai edukasi mengenai keamanan dan penggunaan rekening.

"Namun, tentunya benar, masih ada perhatian agar rekening tidak menjadi dormant dan kemudian disalahgunakan. Misalnya, pemilik lupa menyimpan informasi dengan aman, lalu PIN-nya diketahui orang lain. Rekening itu bisa digunakan untuk pinjol dan lain-lain," kata Friderica di JIExpo, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

OJK juga menghadapi tantangan serupa dalam program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel). Program tersebut telah menjangkau 88,57 persen pelajar Indonesia, dengan total 59,18 juta rekening dan nilai simpanan mencapai Rp27 triliun.

Besarnya jumlah rekening itu perlu diikuti upaya memastikan tabungan tetap digunakan dan tidak berhenti beraktivitas setelah pemiliknya menyelesaikan pendidikan.

Friderica mengatakan, edukasi keuangan perlu berlanjut hingga pelajar memasuki jenjang pendidikan berikutnya. OJK mendorong rekening SimPel dapat beralih ke produk Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), sehingga kebiasaan menabung tidak terputus setelah masa sekolah berakhir.

"Karena itu, edukasi terus kami lakukan agar rekening-rekening tersebut tetap menemani anak-anak. Tidak hanya didorong penggunaannya selama di sekolah, tetapi juga ketika mereka melanjutkan pendidikan, karena rekening SimPel bisa beralih ke SiMuda," ujar Friderica.

Melalui SiMuda, dana tabungan dapat dipersiapkan untuk berbagai kebutuhan masa depan, termasuk pembelian properti maupun investasi reksa dana sesuai kebutuhan pemilik rekening. Namun, pemanfaatan produk keuangan tersebut tetap membutuhkan pendampingan agar masyarakat memahami risiko, menjaga keamanan rekening, dan menggunakan layanan keuangan secara tepat.(tin,rla/dya)

2 PRAJURIT DIDUGA TERLIBAT KORUPSI DANA BENCANA, KPK TUNGGU RESPONS PANGLIMA TNI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu jawaban Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). KPK telah mengirimkan surat pada 20 Oktober 2026 yang memuat konstruksi perkara dan dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.

KASUS KORUPSI BNPB DALAM ANGKA

Anggaran & Nilai Proyek

- **Rp148,03 Miliar:** Total nilai pengadaan proyek bencana (2024–2026) lewat penunjukan langsung vendor terafiliasi.
- **Rp45,76 Miliar:** Anggaran bermasalah tahun 2024.
- **Rp52,27 Miliar:** Anggaran bermasalah tahun 2025.
- **Rp50,00 Miliar:** Anggaran bermasalah tahun 2026.

Pencucian Uang & Saham

- **Rp30,98 Miliar:** Dana korupsi yang dialihkan untuk membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA).
- **150,4 Juta Lembar:** Jumlah saham MDLA yang diborong.
- **1,07%:** Porsi kepemilikan saham yang dikuasai hasil dari uang rasuah.
- **Rp206:** Harga saham per lembar saat dibeli pada 13 Oktober 2026.





Kapuspen TNI, Mayjen Muhammad Nas.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, penyidik belum dapat mengungkap identitas maupun peran kedua prajurit tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung. "Kita menunggu nanti balasan atau konfirmasi dari pihak TNI," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya menyebut terdapat dua anggota TNI aktif dalam konstruksi perkara yang tengah diusut. KPK berharap pihak TNI segera menindaklanjuti informasi yang disampaikan melalui surat kepada Panglima TNI. Menurut Budi, penyidikan masih berada pada tahap awal sehingga terbuka kemungkinan pengembangan terhadap pihak-pihak lain.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menyatakan institusinya menghormati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. TNI, kata dia, akan berkoordinasi dengan KPK dan menindaklanjuti setiap informasi resmi sesuai mekanisme serta ketentuan hukum yang berlaku. Hingga Kamis (22/10/2026), belum ada pengumuman terbuka mengenai identitas dua prajurit yang dimaksud maupun langkah penanganan khusus terhadap mereka.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Gabriel Purwaka Sigit, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; Bima Setiawan dan Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; serta Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin dari pihak swasta. Bima diketahui merupakan adik Letjen TNI Suharyanto, yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB.

Dalam pengembangan perkara, KPK menyoroti pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB selama periode 2024–2026 yang nilainya mencapai Rp148 miliar. Pengadaan tersebut berkaitan dengan penggunaan DSP untuk penanganan berbagai bencana, antara lain kebakaran hutan dan lahan di Papua serta Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, serta gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KPK menduga terdapat konflik kepentingan dan praktik suap dalam penggunaan dana tersebut.

"Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap," kata Achmad Taufik Husein. Penyidik juga mendalami dugaan afiliasi sejumlah penyedia barang dan jasa dengan Bima Setiawan, serta menelusuri peran pihak-pihak lain dalam rangkaian pengadaan. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

KPK sebelumnya mengumumkan penyitaan barang bukti dengan nilai sekitar Rp5,47 miliar. Barang yang disita meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, US$7.500, dan 9.000 dolar Singapura; 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta; tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta; serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

Penyidik juga menggeledah ruang Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut untuk mencari bukti terkait perkara.

Pengusutan dugaan keterlibatan prajurit TNI menambah dimensi koordinasi antarlembaga dalam perkara yang menyangkut dana darurat kebencanaan. KPK telah menyampaikan konstruksi perkara kepada pimpinan TNI dan berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer TNI.

Namun, identitas, peran, dan bentuk pertanggungjawaban hukum para pihak yang diduga terlibat masih menunggu pendalaman penyidik. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tak Pakai Pasal Ancaman Mati?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tersangka kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Padahal, Pasal 2 memuat ketentuan pidana mati dalam keadaan tertentu. KPK beralasan, keterbatasan waktu dalam penanganan operasi tangkap tangan (OTT) membuat penyidik harus segera menentukan status perkara dan menetapkan pasal berdasarkan kecukupan alat bukti yang tersedia.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, penyidik memiliki waktu 1 x 24 jam setelah OTT untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). "KPK hanya mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status prosesnya apakah naik ke tahap penyidikan," kata Taufik.

Menurut Taufik, ketentuan dalam KUHAP terbaru juga menjadi pertimbangan penyidik ketika menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT. Setelah melakukan gelar perkara dan mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang ditemukan dalam penyelidikan, KPK akhirnya menerapkan Pasal 12 huruf i UU Tipikor terkait benturan kepentingan dalam pengadaan.

Taufik menjelaskan, penyidik menemukan dugaan keterkaitan sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa dengan pihak penyelenggara negara, termasuk pihak yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan Kepala BNPB. "Karena ada beberapa kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa itu kemudian juga terafiliasi beberapa perusahaan dengan pihak penyelenggara negara dan saudara atau masih ada hubungan atau orang kepercayaan dari Kepala Badan BNPB," ujarnya.(tin,rls,ant,ktn/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

Hari Kedua Pemadaman TPA Supit Urang

Pemadaman Terkendala 'Hidden Fire' hingga Angin

MALANG - Pemadaman kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, Kota Malang, memasuki hari kedua pada Kamis (22/10/2026). Petugas masih menghadapi kendala berupa hidden fire atau titik api tersembunyi di bawah gunungan sampah, yang membutuhkan penanganan khusus.

"Perkembangan sampai siang hari ini alhamdulillah sudah menunjukkan penurunan jumlah titik api. Namun, upaya pemadaman masih terus kami lakukan karena di bawah timbunan gunungan sampah ini masih terdapat hidden fire yang tentunya memerlukan treatment khusus dalam upaya pemadamannya," ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang, Pandu Rizki Darmawan, Kamis (22/10/2026).

Dijelaskannya, penanganan kebakaran di area timbunan sampah berbeda dengan pemadaman kebakaran bangunan gedung. Jika api pada bangunan umumnya terlihat dari permukaan, Pandu menyebut titik api di gunungan sampah dapat berada di bawah timbunan dengan kedalaman yang belum diketahui secara pasti.

Kondisi tersebut membuat petugas tidak bisa hanya menyemprotkan air ke permukaan sampah. Air yang dialirkan harus menjangkau bagian bawah timbunan agar titik api yang tersembunyi dapat ditangani.

Selain hidden fire, kata Pandu, angin kencang menjadi tantangan lain yang dihadapi petugas. Disebutkannya, area kebakaran berada di zona barat dan zona tengah, dengan perambatan api yang meluas dari sisi barat menuju zona timur.

Zona barat merupakan lokasi awal munculnya api yang berbatasan langsung dengan Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Sementara itu, angin kencang turut memengaruhi perambatan api ke area lain. "Untuk kendala, tentu kami harus berpacu dengan angin dan cuaca yang ada saat ini," katanya.

Lebih lanjut, memasuki hari kedua pemadaman, Pandu memastikan seluruh petugas dan relawan yang terlibat masih dalam kondisi prima dan siap melanjutkan penanganan. Pihaknya juga berupaya menyelesaikan pemadaman secepat mungkin untuk meminimalkan dampak kebakaran, terutama terhadap aktivitas masyarakat yang terdampak.



Petugas dan relawan melakukan upaya pemadaman api di gunungan sampah area sanitary landfill TPA Supit Urang Kota Malang, Kamis (22/10/2026). (Santi/Lentera)

Meski demikian, ia belum dapat memastikan waktu yang dibutuhkan hingga kebakaran benar-benar padam. "Sebagai gambaran, kebakaran TPA Supit Urang pada 2022 lalu membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk memastikan api sepenuhnya padam," katanya.

Pandu menilai, dukungan dari berbagai pihak dalam penanganan kebakaran kali ini lebih baik dan lebih banyak dibandingkan dengan kejadian sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendasari optimisme petugas untuk menyelesaikan pemadaman dalam waktu lebih singkat. (Santi/Dya)

Rambu 56 Titik
Halte Bus Trans Jatim Koridor 2 Malang **Mulai Dipasang**



Ilustrasi: Bus Stop Trans Jatim Koridor Malang Raya. (Santi/Lentera)

MALANG- Persiapan operasional Bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya di Kabupaten Malang memasuki tahap pemasangan rambu pemberhentian. Sebanyak 56 titik bus stop atau halte disiapkan untuk mendukung layanan transportasi yang menghubungkan Kota dengan Kabupaten Malang tersebut.

"Terkait sarana dan prasarana Trans Jatim Koridor 2, kewenangannya ada di Dishub Provinsi Jawa Timur. Saat ini proses pemasangan rambu bus stop di 56 titik guna menyambut launching. Pembangunan halte Trans Jatim juga masih dalam proses," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malang, Eko Margianto, Kamis (22/10/2026).

Dari sisi rute, disebutkannya, jalur Trans Jatim Koridor 2 yang melintasi Kabupaten Malang dipastikan belum mengalami perubahan dari rencana awal. Layanan ini akan bergerak dari Terminal Hamid Rusdi menuju Sempalwadak, Bululawang, Krebet, Gondanglegi, Kepanjen, hingga Talangagung.

"Untuk jalur di wilayah Kabupaten Malang tidak ada perubahan. Tetap Terminal Hamid Rusdi, Sempalwadak, Bululawang, Krebet, Gondanglegi, Kepanjen dan Talangagung," terang Eko.

Jalur tersebut mencakup sejumlah kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Kepanjen menjadi salah satu titik strategis karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Dari kawasan tersebut, layanan direncanakan berlanjut hingga Talangagung.

Untuk mendukung operasional koridor ini, sebanyak 15 unit bus disiapkan melayani perjalanan di jalur yang menghubungkan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kehadiran armada tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif transportasi umum bagi masyarakat yang beraktivitas di kedua wilayah.

Meski demikian, kesiapan layanan tidak hanya bergantung pada ketersediaan armada. Pemasangan rambu pemberhentian dan penyelesaian pembangunan halte juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan fasilitas bagi calon penumpang.

Keberadaan 56 titik bus stop diharapkan memberikan kejelasan lokasi naik dan turun penumpang, sehingga aktivitas tersebut dapat berlangsung lebih tertib. Namun, hingga Kamis (22/10/2026), menurutnya pembangunan halte masih berjalan dan menjadi salah satu pekerjaan yang belum rampung dalam persiapan sarana dan prasarana koridor tersebut.

Eko menegaskan, penyediaan sarana dan prasarana utama tetap berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dishub Jatim. Adapun Pemerintah Kabupaten Malang mendukung persiapan operasional, terutama terkait kesiapan jalur dan titik pemberhentian yang berada di wilayahnya.

Dengan persiapan 15 unit bus dan pemasangan rambu di 56 titik, Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya diproyeksikan menjadi alternatif angkutan umum bagi masyarakat. Sementara itu, pembangunan halte yang masih berlangsung menjadi bagian dari tahapan persiapan yang perlu terus dipantau menjelang peluncuran layanan tersebut.

Sebagai informasi, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya telah beroperasi sejak November 2025. Koridor ini melayani rute yang mencakup wilayah Kota Malang hingga Kota Batu. Perjalanan dimulai dari Terminal Hamid Rusdi di Kecamatan Kedungkandang, melintasi kawasan Kayutangan Heritage, hingga berakhir di Terminal Kota Batu yang berada di depan Pasar Induk Among Tani.(Santi/Dya)

HOUTHI KEMBALI SERANG SAUDI, 2 WARGA TEWAS

Serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi kembali menelan korban jiwa dan mengancam keselamatan warga sipil. Dua orang tewas dan delapan lainnya terluka dalam serangan ke Bandara Internasional King Fahd di Dammam, Rabu (21/10/2026). Di tengah eskalasi tersebut, Amerika Serikat memerintahkan pegawai pemerintah non-esensial beserta anggota keluarga mereka meninggalkan Arab Saudi.



Pasukan Pemerintah Yaman yang dibeking Arab Saudi menembakkan senjata dari atas kendaraan militer, saat perang melawan Houthi berkecamuk di garis depan Jabal Han, barat Kota Taiz, Yaman, 21 Oktober 2026.(AFP)

Otoritas Penerbangan Sipil Umum Arab Saudi (GACA), seperti dilaporkan Al Jazeera pada Kamis (22/10), mengonfirmasi jatuhnya korban dalam serangan tersebut. Dua korban tewas terdiri atas seorang warga negara Saudi dan seorang warga negara India. Adapun delapan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Serangan ke Bandara King Fahd menambah daftar infrastruktur sipil yang menjadi sasaran dalam eskalasi konflik. Pada hari yang sama, dua orang juga dilaporkan tewas setelah pertahanan Saudi mencegat sebuah drone yang diduga hendak menyerang fasilitas perusahaan minyak Aramco di Shaybah. Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan meluasnya ancaman terhadap fasilitas penerbangan dan energi Saudi.

Sebelumnya, serangan juga menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Menurut laporan yang dikutip Tirto, serangan proyektil pada 11 Oktober menewaskan satu orang dan melukai 11 lainnya. Pada 10 Oktober, otoritas penerbangan sipil Saudi juga mengumumkan serangan terpisah yang dilaporkan menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi warga sipil ketika infrastruktur penting terseret ke dalam konflik.

AS Tarik Stafnya

Merespons situasi keamanan yang memburuk, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu (21/10) memerintahkan pegawai pemerintah yang tidak bertugas dalam fungsi esensial beserta anggota keluarga mereka untuk meninggalkan Arab Saudi. Juru bicara Kemlu AS, Tommy Pigott, menyatakan keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya tindakan permusuhan Houthi terhadap kerajaan itu.

"Kelompok Houthi yang didukung Iran semakin sering melakukan tindakan permusuhan terhadap Arab Saudi, termasuk serangan ke bandara sipil dan infrastruktur penting lainnya, yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil serta gangguan perjalanan yang parah," kata Pigott.

Ia menegaskan keselamatan personel diplomatik dan keluarga mereka menjadi prioritas pemerintah AS. Washington, menurut Pigott, akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi dan mendukung personelnya.

Dalam pernyataan yang sama, Pigott membantah laporan sebelumnya mengenai rencana AS memulangkan sebagian personel dari kedutaan-kedutaan besarnya di kawasan Teluk sebagai informasi yang tidak akurat.

Namun, mengutip empat pejabat AS yang tidak disebutkan namanya bahwa misi diplomatik AS di negara-negara Teluk lainnya juga akan memerintahkan anggota keluarga staf untuk pergi.

Kedutaan Besar AS di Riyadh sebelumnya telah mengeluarkan peringatan keamanan mengenai kemungkinan serangan lanjutan Houthi pada Rabu. Kemlu AS juga mengimbau warga negaranya di Saudi untuk mengikuti panduan keamanan yang dikeluarkan pemerintah kerajaan dan berhati-hati apabila memilih menggunakan bandara di negara tersebut.

Langkah terbaru Washington berlangsung setelah dalam beberapa bulan terakhir AS menempatkan kembali sebagian personel diplomatik di kawasan itu. Sebelumnya, sejumlah besar staf ditarik ketika Iran melancarkan serangan terhadap fasilitas milik AS di kawasan tersebut. Kedutaan AS di Riyadh, yang juga menampung kantor perwakilan CIA, pernah diserang drone pada awal Maret, ketika serangan Iran meluas di kawasan Timur Tengah.

Serangan Meluas ke Yaman

Eskalasi tidak hanya terjadi di wilayah Arab Saudi. Dilaporkan, kelompok Houthi menyerang Bandara Internasional Riyan di Kota Al Mukalla, wilayah Hadhramaut, Yaman, pada Rabu (21/10). Mengutip portal berita setempat Hadramawt.net, serangan itu menggunakan tiga drone yang mengenai landasan pacu dan sejumlah fasilitas pasokan listrik bandara. Informasi awal menyebutkan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Pada hari yang sama, Houthi juga mengklaim menyerang markas operasional militer Arab Saudi di Aden, kota yang menjadi pusat pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.

Sehari sebelumnya, sebanyak 73 orang dipastikan tewas akibat serangan Houthi terhadap pusat pelatihan keamanan di sebuah pangkalan militer di Yaman tenggara. Otoritas Provinsi Shabwa menyatakan operasi pencarian masih berlangsung untuk menemukan 14 orang lain yang belum diketahui nasibnya. Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan 49.000 jemaah umrah asal Indonesia di Arab Saudi dalam kondisi aman di tengah eskalasi serangan kelompok Houthi. Meski serangan menyasar Bandara Internasional King Fahd di Dammam pada Rabu (21/10/2026), operasional bandara utama jemaah umrah di Jeddah dan Madinah masih berjalan normal.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan seluruh warga negara Indonesia (WNI) dan pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi dilaporkan aman. "Hingga saat ini, seluruh WNI maupun PMI yang berada di wilayah Arab Saudi dilaporkan dalam kondisi aman," ujar Heni dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Heni menjelaskan, dampak serangan terhadap penerbangan lebih terasa di wilayah Riyadh. Sementara itu, penerbangan di Jeddah dan Madinah masih beroperasi normal, meski terdapat penyesuaian jadwal dan pembatalan penerbangan. Hingga Rabu, tingkat pembatalan penerbangan di kedua bandara tersebut tercatat 7 persen, sedangkan penundaan mencapai 11 persen. (tin,rtr,ist,rls/dya)



Para penumpang yang hendak menuju Arab Saudi masih terlantar di Bandara Internasional Hazrat Shahjalal di Dhaka pada 12 Oktober 2026, setelah penerbangan mereka dibatalkan sehari pascaserangan Houthi terhadap bandara internasional Riyadh.(dok.ist)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan TODAY

Suka Baca Buku Fiksi, Jaga Kesehatan Mental

Membaca fiksi bukan sekadar hiburan. Kebiasaan ini dapat membantu pembaca memahami emosi, melihat persoalan dari sudut pandang berbeda, dan memberi jeda dari tekanan sehari-hari.

Membaca novel atau cerita fiksi kerap dianggap sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang. Padahal, mengikuti perjalanan tokoh, memahami konflik, hingga menebak alasan di balik tindakan seseorang dapat menjadi latihan untuk mengenali emosi dan memahami orang lain.

Di tengah kebiasaan mengonsumsi video pendek dan arus informasi yang terus bergerak, membaca fiksi menawarkan pengalaman berbeda. Pembaca perlu mengikuti alur cerita, mengingat peristiwa, dan memahami hubungan antartokoh. Aktivitas ini juga memberi ruang untuk berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari.

Mengutip Your Tango mengenai tujuh alasan membaca fiksi dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Sejumlah penelitian ilmiah juga menunjukkan adanya manfaat membaca fiksi bagi kemampuan memahami perspektif orang lain, meski dampaknya tidak selalu sama pada setiap pembaca.

Membantu Memahami Emosi

Salah satu daya tarik fiksi adalah kesempatan untuk memasuki kehidupan tokoh yang berbeda dari pengalaman pembaca. Melalui cerita, seseorang dapat mengikuti pergulatan batin, konflik keluarga, persoalan sosial, hingga keputusan sulit yang dihadapi karakter.Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Literacy pada 2025 mengeksplorasi pengalaman 37 remaja berusia 12–14 tahun di dua sekolah menengah di Skotlandia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian peserta merasa membaca fiksi membantu mereka memahami perspektif tokoh dan menghubungkannya dengan pengalaman orang lain dalam kehidupan nyata.

Namun, manfaat tersebut tidak dirasakan semua peserta. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman membaca dan pengaruhnya terhadap empati dapat berbeda-beda.

Melatih Perhatian

Membaca novel menuntut pembaca mengikuti alur, mengingat detail, serta menghubungkan kejadian yang berlangsung di berbagai bagian cerita. Berbeda dengan video pendek yang menyajikan informasi secara cepat, novel biasanya membutuhkan keterlibatan lebih lama untuk memahami keseluruhan kisah.5

Artikel ilmiah Inge van de Ven yang diterbitkan dalam Orbis Litterarum pada 2024 membahas hubungan antara membaca karya sastra dan perhatian. Kajian tersebut menjelaskan bahwa membaca sastra melibatkan berbagai cara mengelola perhatian,

mulai dari membaca secara saksama hingga memilih bagian yang dianggap penting.

Meski demikian, membaca buku tidak otomatis menjamin rentang perhatian seseorang menjadi lebih panjang. Pengaruhnya bergantung pada karakteristik bacaan dan cara pembaca terlibat dalam cerita.

Mengembangkan Imajinasi

Cerita fiksi mengajak pembaca membayangkan tempat, karakter, dan peristiwa yang belum tentu pernah mereka temui. Pembaca juga dapat diajak mempertimbangkan berbagai kemungkinan ketika tokoh menghadapi masalah.

Proses tersebut memberi kesempatan untuk melatih pemahaman terhadap situasi yang kompleks. Ketika mengikuti konflik cerita, misalnya, pembaca dapat memikirkan alasan setiap tokoh bertindak dan konsekuensi dari keputusan mereka.

Kemampuan membayangkan beragam kemungkinan ini berpotensi membantu pembaca melihat persoalan dari lebih dari satu sudut pandang. Namun, manfaat tersebut bukan berarti setiap orang yang membaca fiksi pasti memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik.

Memberi Jeda dari Paparan Layar

Membaca buku fisik dapat menjadi alternatif ketika seseorang ingin mengurangi waktu menggunakan gawai. Aktivitas ini memberi kesempatan untuk menjauh sejenak dari notifikasi, linimasa media sosial, dan informasi yang datang bertubi-tubi.Meski begitu, manfaat tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh bentuk bukunya. Membaca melalui buku elektronik juga dapat memberikan pengalaman yang serupa, bergantung pada kebiasaan pengguna dan gangguan yang muncul selama membaca.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara membaca secara mendalam dan sekadar berpindah dari satu konten ke konten lain. Membaca cerita dengan penuh perhatian dapat menjadi pengalaman yang berbeda dari kebiasaan menggulir layar tanpa tujuan yang jelas.

Sarana Mengelola Stres

Ketika menghadapi tekanan pekerjaan, persoalan keluarga, atau kelelahan setelah beraktivitas, membaca cerita dapat membantu mengalihkan perhatian sejenak. Pembaca berkesempatan memasuki dunia cerita dan memberi jarak dari persoalan yang sedang dihadapi.

Pengalihan perhatian ini dapat menjadi bentuk istirahat psikologis. Namun, membaca fiksi bukan berarti masalah yang dihadapi akan selesai dengan sendirinya.

Penelitian mengenai lima bentuk keterlibatan dengan fiksi yang diterbitkan dalam Scientific Study of Literature pada 2022 menemukan hasil yang beragam. Paparan cerita saja tidak selalu langsung meningkatkan kesejahteraan emosional.

Hasil yang lebih mendukung muncul dalam beberapa studi ketika peserta mengingat kembali atau mendiskusikan cerita yang dibaca.(far,ist/dya)



Waspada!
WhatsApp Palsu Tembus Play Store

Aplikasi palsu yang menyamar sebagai WhatsApp ditemukan di Google Play Store dan telah diunduh lebih dari 500.000 kali. Aplikasi tersebut memiliki tampilan yang menyerupai layanan pesan instan milik Meta, sehingga berpotensi mengecoh pengguna Android yang tidak teliti saat mengunduh aplikasi.

Temuan ini bermula dari laporan seorang pengguna Reddit yang melihat aplikasi WhatsApp palsu muncul di bagian iklan bersponsor, tepat di atas aplikasi resminya. Berdasarkan laporan, aplikasi tersebut diterbitkan oleh pengembang bernama Agment Assets Sallu. Aplikasi itu menjadi satu-satunya produk yang tercatat atas nama pengembang tersebut.

Informasi di Google Play Store menunjukkan aplikasi itu pertama kali dirilis pada September 2026. Dalam waktu relatif singkat, jumlah unduhannya menembus setengah juta. Saat laporan tersebut diterbitkan, aplikasi itu dilaporkan masih tersedia di Play Store.

Halaman aplikasi palsu tersebut dibuat menyerupai versi asli, mulai dari ikon, tangkapan layar, hingga teks deskripsi. Kemiripan ini membuat pengguna perlu memeriksa identitas pengembang dan informasi lain sebelum menekan tombol instalasi.

Sebagai pembanding, WhatsApp resmi memiliki lebih dari 10 miliar unduhan dan lebih dari 246 juta ulasan di Google Play Store. Aplikasi resmi tersebut juga memiliki lencana Editor's Choice.

Jumlah unduhan dan ulasan memang bukan satu-satunya penentu keamanan, tetapi dapat menjadi petunjuk awal untuk membedakan aplikasi resmi dari tiruannya.Meski demikian, kemunculan aplikasi palsu sebagai iklan bersponsor tidak dialami semua pengguna. Dalam penelusuran detikINET melalui aplikasi Play Store di ponsel maupun situs webnya, hasil teratas pencarian WhatsApp justru mengarah ke aplikasi resmi. Aplikasi yang mencurigakan itu tidak muncul dalam hasil pencarian tersebut.

Dikutip dari Android Authority, aplikasi palsu itu diduga memanfaatkan program Early Access di Google Play Store. Program ini memungkinkan pengguna mencoba aplikasi sebelum dirilis secara luas. Dalam kondisi tertentu, ulasan publik pada aplikasi yang mengikuti program tersebut dapat dinonaktifkan, sehingga pengguna memiliki lebih sedikit informasi untuk menilai kredibilitasnya.

Hingga laporan dipublikasikan, belum tersedia analisis yang memastikan ancaman keamanan maupun dampak terhadap pengguna yang telanjur memasang aplikasi tersebut.

Karena itu, belum dapat dipastikan apakah aplikasi tersebut mengandung malware, mencuri data, atau menjalankan aktivitas berbahaya lainnya.Kasus ini kembali menyoroti tantangan pengawasan aplikasi di toko digital.

Google Play Store memiliki proses peninjauan untuk menyaring aplikasi sebelum tersedia bagi pengguna. Namun, temuan aplikasi tiruan yang berhasil mengumpulkan ratusan ribu unduhan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak selalu mampu mencegah aplikasi mencurigakan beredar.Android Authority sebelumnya juga melaporkan aplikasi Google Chrome palsu yang telah diunduh lebih dari 100.000 kali sebelum akhirnya dihapus.



Kemunculan aplikasi tiruan yang bahkan dapat memanfaatkan iklan berbayar memperbesar risiko pengguna menemukan aplikasi bermasalah saat melakukan pencarian biasa.

Periksa Sebelum Mengunduh

Pastikan nama pengembang sesuai dengan penerbit resmi, perhatikan riwayat unduhan dan ulasan, serta akses aplikasi melalui kanal resmi. Untuk WhatsApp, pengguna dapat mencari aplikasi melalui situs resmi WhatsApp yang mengarahkan ke toko aplikasi tepercaya.

Jika telanjur memasang aplikasi yang dicurigai palsu, hentikan penggunaannya dan hapus aplikasi tersebut. Periksa kembali izin aplikasi yang pernah diberikan, jalankan pemindaian keamanan perangkat, serta perbarui sistem dan aplikasi melalui sumber resmi.

Apabila pernah memasukkan informasi sensitif atau menemukan aktivitas akun yang tidak wajar, segera amankan akun terkait.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberadaan aplikasi di toko resmi tidak otomatis menjamin keasliannya. Ketelitian pengguna tetap diperlukan, sementara platform distribusi aplikasi perlu memastikan proses pemeriksaan dan pengawasan berjalan efektif agar aplikasi tiruan tidak terus menjangkau pengguna.(far,ist/dya)

HARIAN LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA,MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I SIDOARJO:** TEGUH A **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** AIS **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) **I MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. **I TRENGGALEK:** HERLAMBANG **I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN,FADHILA **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26,JL TENGGILIS TENGAH 4 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

Sisir Kotor Bisa Bikin Rambut Lepek dan Kulit Kepala Gatal

Sisa minyak, sel kulit mati, dan produk penataan rambut dapat menumpuk pada sisir. Jika dibiarkan, kotoran itu bisa berpindah kembali ke rambut dan kulit kepala.

Mencuci rambut secara rutin belum tentu cukup untuk menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala. Ada satu benda yang kerap luput dari perhatian, yakni sisir yang digunakan hampir setiap hari.Sisir dapat menampung minyak alami rambut, helaian rambut yang rontok, sel kulit mati, debu, hingga sisa produk penataan rambut. Jika tidak dibersihkan, tumpukan tersebut dapat menempel kembali pada rambut setiap kali sisir digunakan.

Dokter kulit asal Amerika Serikat, Dr. Emily Nadelmann, mengingatkan pentingnya memperlakukan sisir sebagai perlengkapan perawatan pribadi. "Anggaplah sisir rambut sebagai barang perawatan pribadi yang layak mendapat perhatian yang sama seperti sikat gigi," ujarnya.

Menurut Dr. Monique Chheda, kotoran yang menumpuk pada sisir dapat memengaruhi tampilan dan tekstur rambut. Sementara itu, pakar dermatologi Dr. Kseniya Kobets menjelaskan bahwa mikroorganisme yang bercampur dengan minyak dan kotoran berpotensi memengaruhi kondisi kulit kepala.

Rambut Lebih Cepat Lepek

Minyak alami atau sebum diproduksi kulit kepala untuk membantu menjaga kelembapan kulit. Namun, minyak yang menempel pada sisir dapat berpindah kembali ke rambut dan membuatnya terlihat lebih berminyak."Minyak sangat mudah menumpuk di sisir rambut. Minyak itu kemudian didistribusikan kembali ke rambut, yang dapat membuat rambut terlihat lebih berminyak lebih cepat dan mungkin membuatnya terasa berat," ujar Dr. Monique.Akibatnya, rambut yang baru dicuci pun dapat terlihat kurang segar apabila sisir yang digunakan masih menyimpan banyak residu.

Ketombe dan Rasa Gatal

Sisir yang tidak dibersihkan dapat menyimpan serpihan kulit mati dan minyak. Menurut Dr. Kseniya, penumpukan tersebut dapat berkaitan dengan pertumbuhan Malassezia, sejenis ragi yang secara alami hidup di kulit dan berhubungan dengan ketombe pada sebagian orang.

Meski demikian, ketombe tidak selalu disebabkan oleh sisir kotor. American Academy of Dermatology (AAD) menjelaskan bahwa ketombe dapat berkaitan dengan kulit berminyak, kebiasaan perawatan rambut, serta kondisi medis tertentu. Karena itu, menjaga kebersihan sisir merupakan salah satu langkah perawatan, bukan satu-satunya cara mengatasi ketombe.



Iritasi dan Masalah Kulit Kepala

Penumpukan minyak, sisa produk, dan kotoran dapat membuat sisir menjadi kurang higienis. Jika kotoran terus berpindah ke rambut dan kulit kepala, kondisi tersebut berpotensi memperburuk ketidaknyamanan atau iritasi pada sebagian orang.

Dr. Kseniya juga mengingatkan kemungkinan kaitannya dengan masalah kulit kepala, termasuk dermatitis seboroik dan folikulitis. Dermatitis seboroik merupakan kondisi peradangan kulit yang dapat menyebabkan kulit bersisik dan gatal, sedangkan folikulitis adalah peradangan pada folikel rambut yang dapat disebabkan oleh infeksi maupun faktor lain.

Sisa Produk Penataan Rambut Menumpuk

Penggunaan hairspray, gel, krim, dan minyak rambut dapat meninggalkan residu pada sela-sela bulu sisir. Jika dibiarkan, lapisan residu itu bercampur dengan minyak dan sel kulit mati sehingga sisir lebih cepat kotor.Penumpukan tersebut juga membuat sisir perlu dibersihkan lebih sering, terutama jika digunakan setiap hari untuk menata rambut.

Kapan Dibersihkan, Kapan Diganti

Dr. Kseniya menyarankan membersihkan sisir setiap dua atau tiga hari, dengan mempertimbangkan jenis rambut, kondisi kulit kepala, dan produk yang digunakan."Semakin banyak kotoran yang menumpuk, semakin cepat sisir menjadi tempat berkembang biaknya kotoran dan mikroorganisme," ujarnya.Orang yang sering menggunakan produk penataan rambut atau memiliki rambut berminyak perlu lebih memperhatikan kebersihan sisir. Begitu pula mereka yang mengalami ketombe atau dermatitis seboroik.

Untuk penggunaan sehari-hari, helaian rambut yang tersangkut sebaiknya segera dibuang dan tidak dibiarkan menumpuk. Panduan perawatan rambut dari Healthline juga menyarankan pembersihan lebih teratur bagi pengguna produk penataan rambut, dengan frekuensi disesuaikan dengan banyaknya residu.

Khusus jika mengalami infeksi kulit kepala seperti kurap, sisir perlu dibersihkan dan didisinfeksi sesuai anjuran tenaga kesehatan selama masa pengobatan. Sisir juga sebaiknya tidak digunakan bersama orang lain karena sejumlah kondisi kulit kepala dapat menular melalui benda yang terkontaminasi.

Menurut Dr. Monique Chheda, kotoran yang menumpuk pada sisir dapat memengaruhi tampilan dan tekstur rambut. Sementara itu, pakar dermatologi Dr. Kseniya Kobets menjelaskan bahwa mikroorganisme yang bercampur dengan minyak dan kotoran berpotensi memengaruhi kondisi kulit kepala.(far,ist/dya)

Cara Membersihkan Sisir dengan Benar

1.Buang rambut yang tersangkut. Lepaskan helaian rambut dari sela-sela bulu sisir sebelum mencucinya.

2.Siapkan air hangat dan sampo lembut. Campurkan beberapa tetes sampo ke dalam wadah berisi air hangat.

3. Rendam sisir sekitar 15 menit. Langkah ini dapat diterapkan pada sisir yang sesuai untuk direndam. Sisir bergagang kayu atau berbulu alami sebaiknya tidak direndam terlalu lama agar tidak rusak.

4. Gosok sela-sela bulu sisir. Gunakan sikat gigi bekas yang bersih untuk membantu mengangkat sisa minyak dan kotoran.

5. Bilas dengan air mengalir. Pastikan tidak ada sisa sampo atau kotoran yang tertinggal.

SEPUPU TAK INGAT ....dari Hal 1

Dumatno Budi Utomo, sepupu mantan Presiden Joko Widodo, mengaku tidak mengetahui secara langsung proses perkuliahan Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pengetahuannya mengenai riwayat pendidikan Jokowi, kata dia, sebatas informasi yang pernah didengar dalam obrolan keluarga.

Keterangan itu disampaikan Dumatno ketika menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Jaksa penuntut umum menghadirkan Dumatno bersama Dian Sandi Utama dalam agenda pemeriksaan saksi.

"Secara langsung kalau status terkait itu (perkuliahan Jokowi) saya tidak (tahu). Tapi kan di (cerita) keluarga dulu, beliau kan cita-citanya ingin untuk kerja di kehutanan gitu," kata Dumatno di persidangan.

Ia menjelaskan, informasi mengenai pendidikan Jokowi di UGM pernah dibicarakan dalam lingkungan keluarga. Namun, ia tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses perkuliahan tersebut berlangsung.

"Kayak namanya di obrolan keluarga itu ya, itu pernah diobrolin. Jadi, saya pernah dengar," ujarnya.

Dumatno merupakan sepupu Jokowi dari hubungan kakek dan nenek mereka yang disebut bersaudara. Ia mengatakan masih kerap bertemu Jokowi dalam pertemuan keluarga, terutama saat hari raya. "Setiap hari raya, minimal setiap hari raya itu ada pertemuan keluarga yang di mana pasti berjalan," katanya.

Dumatno juga mengaku belum pernah melihat ijazah Jokowi secara langsung. "Dan terkait ijazah yang ditampilkan ini, beliau juga belum pernah (menunjukkannya)," kata dia. Ia menyebut usianya masih sekitar delapan tahun ketika Jokowi dikatakan telah menyelesaikan kuliah sehingga tidak mengingat secara terperinci tahun maupun riwayat perkuliahannya.

Meski mengaku tidak mengetahui langsung proses kuliah Jokowi, Dumatno memberikan keterangan lain ketika ditanya mengenai dokumen yang diperlihatkan dalam sidang.

Menurut laporan, ia mengidentifikasi foto pada ijazah yang ditunjukkan sebagai foto Jokowi. Ia juga menyebut Jokowi menyelesaikan kuliah di UGM pada 1985, setelah bekerja di Aceh.

Keterangan tersebut dipersoalkan oleh Dokter Tifa dan kuasa hukumnya. Mereka mempertanyakan kronologi pendidikan yang disampaikan Dumatno, termasuk penyebutan SMA Negeri 6 Surakarta dan tahun kelulusan Jokowi. Dokter Tifa menyatakan sekolah tersebut baru ada pada 1985 dan meragukan kronologi yang diterangkan saksi. Ia menyebut keterangan itu tidak akurat.



Dumatno Budi Utomo, sepupu Jokowi hadir dalam persidangan dokter Tifa sebagai saksi pada Kamis (22/10/2026)

Pernyataan tersebut merupakan keberatan pihak terdakwa dalam persidangan, bukan putusan majelis hakim mengenai kebenaran kesaksian.

Dokter Tifa Pertanyakan Bukti Asli

Asal-usul foto ijazah Joko Widodo yang beredar di media sosial menjadi salah satu pokok pemeriksaan dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 22 Oktober 2026. Saksi Dian Sandi Utama mengaku mendapatkan gambar tersebut dari komentar akun anonim di media sosial X, bukan dari dokumen fisik yang dilihatnya secara langsung.

Dian, yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU), mengatakan awalnya membuat utas mengenai perjalanan pendidikan Jokowi melalui akun X miliknya, @DianSandiU. Dian mengaku mengunduh gambar tersebut dari kolom komentar akun bernama Hyperpoison, lalu mengunggahnya kembali ke akun pribadinya.

Dian mengatakan, sebelum mengunggah foto itu, ia membuat utas mengenai perjalanan pendidikan Jokowi pada akhir Maret 2025. Tak lama kemudian, akun Hyperpoison mengomentari utas tersebut dengan menyertakan gambar yang disebut sebagai ijazah Jokowi. Dian mengaku mengunduh gambar itu sekitar 10–15 detik setelah komentar muncul.

"Pertama-tama saya men-download dulu. Pada saat itu kalau saya tidak salah hanya jarak sekitar 10 sampai 15 detik setelah dia berkomentar saya melihat ijazah itu dan saya men-download," kata Dian dalam persidangan, sebagaimana dilaporkan Warta Ekonomi.

Dian membantah mengubah gambar sebelum mengunggahnya kembali. "Tidak ada sama sekali. Saya mendownload dan memposting sesuai dengan yang dikirim lewat komentar aslinya dari yang dari Hyperpoison," ujarnya.

Namun, jejak unggahan pertama itu kini tidak lagi dapat ditemukan. Dian mengatakan komentar Hyperpoison sudah hilang dari utasnya. Ia juga mengaku sempat berusaha menghubungi pemilik akun tersebut, tetapi belakangan tidak mendapat balasan. Identitas pemilik akun dan asal-usul gambar sebelum diunggah ke kolom komentar itu tidak terungkap dalam laporan persidangan yang tersedia.

Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, Dian juga mengakui belum pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung. "Saya belum pernah melihat," katanya ketika ditanya mengenai dokumen fisik tersebut. Dengan demikian, kesaksiannya mengenai foto yang diunggah berangkat dari gambar digital yang diterimanya melalui akun lain, bukan dari pengamatan langsung terhadap ijazah asli.

Meski demikian, Dian menyatakan memiliki sejumlah alasan untuk meyakini ijazah yang beredar itu asli. Ia menyebut Andi Pramaria, rekan kerjanya di Nusa Tenggara Barat yang menurutnya merupakan teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada 2018, ketika Dian menjabat staf khusus gubernur bidang kehutanan dan Andi menjabat kepala dinas kehutanan, ia mengaku memperoleh informasi mengenai riwayat perkuliahan Jokowi. Andi juga disebut pernah mengirimkan dokumentasi foto masa kuliah Jokowi pada 2022.

"Bahkan data-data, beberapa gambar tentang kuliahnya Pak Jokowi itu, saya sempat dikirimkan tahun 2022 oleh Pak Andi Pramaria," kata Dian.

Selain mempercayai keterangan Andi, Dian menyebut reputasi Jokowi dan penjelasan resmi UGM sebagai dasar keyakinannya. Ia juga mengatakan pernah mencocokkan gambar ijazah yang beredar dengan tayangan reuni UGM pada 2022 di YouTube. Menurut Dian, ia menemukan kesamaan antara gambar yang diunggahnya dan ijazah yang ditampilkan dalam tayangan tersebut.

"Dan pada saat saya mencocokkan itu saya menemukan persis sama dengan yang pernah terpublikasi di acara Reuni UGM pada tahun 2022. Ijazah itu tertayang di YouTube," ujarnya.

Dokter Tifa mempersoalkan asal-usul gambar itu dan mempertanyakan mengapa ijazah asli yang menjadi pusat polemik belum ditampilkan di hadapan majelis hakim. Ia juga menyoroti ketidakhadiran Jokowi sebagai pelapor dalam persidangan. "Tidak satu kali pun pelapor pertama, yaitu Saudara Joko Widodo hadir," kata Tifa.

Ia kemudian mempertanyakan barang bukti yang menurutnya telah disita, tetapi belum diperlihatkan dalam sidang. "Sesuatu yang diributkan oleh kita semua selama bertahun-tahun, yaitu ijazah yang katanya sudah disita, juga tidak dihadirkan," ujarnya. Pernyataan tersebut merupakan keberatan terdakwa, bukan kesimpulan majelis hakim mengenai status barang bukti.

Persidangan juga diwarnai keberatan kuasa hukum Dokter Tifa terhadap pengaturan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim ketua Christina Endarwati meminta jaksa menyampaikan perkiraan durasi pemeriksaan Dian. Jaksa menyebut membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk mengajukan pertanyaan. Setelah itu, hakim mempersilakan pihak terdakwa memanfaatkan waktu pemeriksaan sebaik-baiknya.

Namun, kuasa hukum Dokter Tifa keberatan apabila waktu untuk mengajukan pertanyaan ikut dibatasi. Mereka menilai kebutuhan pemeriksaan pihak terdakwa tidak bisa disamakan dengan jaksa, terutama karena masih ada sejumlah pertanyaan yang hendak diajukan. Perdebatan tersebut muncul saat majelis mengatur jalannya pemeriksaan saksi di ruang sidang.

UGM sendiri telah menyatakan Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan. Dalam klarifikasi resmi pada Juli 2025, kampus menyebut Jokowi menjalani studi sejak 1980 dan lulus pada 5 November 1985. UGM menyatakan keterangan tersebut didasarkan pada data akademik yang dimiliki fakultas. Keterangan kampus itu merupakan sumber tersendiri dan berbeda dari kesaksian Dian di persidangan.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Dokter Tifa berkaitan dengan pernyataan dan analisis yang dipublikasikannya mengenai ijazah Jokowi. Sebelumnya, dalam pembacaan dakwaan pada Juli 2026, jaksa menyebut unggahan Dian pada April 2025 menjadi salah satu bagian dari rangkaian peristiwa yang dipersoalkan. Dokter Tifa sendiri pernah menyatakan bahwa objek kajiannya adalah dokumen digital yang diunggah Dian, bukan ijazah fisik yang diperiksa langsung. (wid,ist,kum,rls/dya)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan
TODAY

PARLEMEN MALAYSIA SENTIL KARHUTLA RI PAKAI BAHASA JAWA: AJA DIGAWE GUYONAN

Kritik terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali datang dari Malaysia. Anggota Dewan Rakyat Malaysia, Kalam Salan. Dia menggunakan bahasa Jawa untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menangani kebakaran yang memicu kabut asap lintas negara. Ditegaskan, persoalan yang berulang setiap tahun itu tidak hanya merugikan masyarakat Indonesia, tetapi juga warga Malaysia, termasuk pekerja asal Indonesia yang kehilangan penghasilan akibat aktivitas perkebunan terganggu.

Dalam bahasa Indonesia, ia meminta Prabowo segera menangani persoalan tersebut dan memadamkan kebakaran hutan agar kedua negara tidak terus menanggung dampak kabut asap setiap tahun.

"Pak Prabowo, tulung masalah iki enggal ditangani. Kobongan alas kudu dipateni. Aja meneh-meneh saben taun Malaysia lan Indonesia padha nandhang susah merga asap," kata Kalam dalam debat anggaran 2027 di parlemen Malaysia, Rabu (21/10/2026).

Dikutip The Star, Kamis (22/10/2026), Kalam sebelumnya menyampaikan kritik dalam bahasa Melayu. Ia menyoroti dampak asap terhadap pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia. Ketika aktivitas perkebunan terganggu, para pekerja ikut kehilangan kesempatan memperoleh upah dan mengirim uang kepada keluarga di kampung halaman.

"Orang Indonesia yang bekerja di ladang Malaysia pun terkena dampaknya. Bila tak bekerja, mereka tak dapat gaji, tak bisa kirim duit ke keluarga ke kampung halaman," ujarnya.

Kalam juga menyentil pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, mengenai hutan Indonesia yang selama ini memasok oksigen bagi Malaysia. Menurut Kalam, argumen tersebut tidak semestinya digunakan untuk menjadikan persoalan kabut asap sebagai bahan lelucon, mengingat Malaysia juga memiliki hutan yang menghasilkan oksigen.

"Mula, aja malah iki digawe guyonan, digawe lucunan, ngomong, nek alas Indonesia wis ngirim oksigen kanggo Malaysia. Lah, alas Malaysia kuwi opo? Mung pokok plastik? Ora iso ngasilke oksigen?" katanya.

Pernyataan itu dapat iterjemahkan sebagai teguran agar persoalan karhutla tidak dianggap bahan bercandaan dengan dalih hutan Indonesia menyediakan oksigen bagi Malaysia. Ia mempertanyakan apakah pepohonan di Malaysia hanya terbuat dari plastik dan tidak mampu menghasilkan oksigen. Kritik tersebut menempatkan kabut asap sebagai persoalan lingkungan dan kesehatan lintas negara, bukan sekadar perdebatan mengenai kontribusi hutan masing-masing negara.



Anggota Parlemen Malaysia Kalam Salan menyampaikan pidato menggunakan bahasa Jawa saat membahas persoalan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (21/10/2026).ist

Penggunaan bahasa Jawa membuat kritik Kalam mendapat perhatian tersendiri. Namun, substansi pesannya tetap mengarah pada tuntutan agar pemerintah Indonesia menangani kebakaran secara serius. Ia meminta persoalan yang berulang tersebut tidak terus dibiarkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat di kedua negara.

Kalam lahir di Sabak Bernam, Selangor, pada 6 Januari 1965. Wilayah tersebut memiliki masyarakat dengan latar belakang keturunan Jawa, Banjar, Kampar, dan Bugis. Situs resmi Sabak Bernam menjelaskan bahwa komunitas-komunitas itu memiliki dialek dan adat istiadat yang beragam. Sejumlah kawasan, termasuk Kampung Batu 40 dan Kampung Sungai Panjang, dihuni masyarakat keturunan Jawa dan Bugis. Meski demikian, tidak ada keterangan resmi yang memastikan Kalam secara pribadi mengidentifikasi diri sebagai keturunan Jawa-Melayu.

Berdasarkan catatan MyMP, Kalam merupakan anggota parlemen yang mewakili Sabak Bernam dari Partai Persatuan Pribumi Malaysia (BERSATU). Ia mulai menjabat pada November 2022. Penggunaan bahasa Jawa dalam pidatonya menjadi cara untuk menyampaikan pesan yang dapat dipahami masyarakat Indonesia, sekaligus menegaskan kedekatan persoalan kabut asap dengan kehidupan sehari-hari warga yang terdampak.

Kabut asap akibat karhutla di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir dilaporkan menjalar hingga ke negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura. Dampaknya tidak berhenti pada penurunan kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, mobilitas, serta kegiatan ekonomi masyarakat. Foto Reuters/Hasnoor Hussain yang dimuat detikcom memperlihatkan asap karhutla menyelimuti Kuala Lumpur pada 9 Oktober 2026.

Reuters melaporkan pada 22 Oktober bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi siaga tinggi meski titik panas sempat menurun. Hujan yang turun belum cukup untuk memadamkan kebakaran secara menyeluruh, sementara kondisi kering yang diperparah fenomena El Niño meningkatkan kerentanan hutan dan lahan gambut. Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 69.000 personel pemadam dan 50 pesawat untuk mendukung operasi pemadaman serta modifikasi cuaca. Emisi karbon dari kebakaran tercatat turun menjadi 14,44 juta ton pada 15–21 Oktober, dari 22,22 juta ton pada pekan sebelumnya.

Pemerintah Malaysia berencana membawa persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia ke pertemuan tingkat menteri ASEAN di Filipina. Malaysia mendorong langkah yang lebih tegas, termasuk kerangka hukum mengikat untuk menjatuhkan sanksi. (wid,ist,nam,rls/dya)

UPDATE KARHUTLA DI INDONESIA HINGGA OKTOBER 2026

Emisi Terbesar Dunia:
Indonesia tercatat sebagai penyumbang emisi karbon karhutla terbesar di dunia pada awal Oktober 2026, dengan rata-rata 2,93 juta ton karbon per hari.

Total Kejadian & Titik Panas:
Terjadi 35.576 kejadian karhutla dengan total 267.781 titik panas (hotspot) berdasarkan pantauan satelit NASA FIRMS.

Total Kejadian & Titik Panas:
Terjadi 35.576 kejadian karhutla dengan total 267.781 titik panas (hotspot) berdasarkan pantauan satelit NASA FIRMS.

Estimasi Luas Lahan Terbakar:

- Data resmi KLHK mencatat 202.010 hektare lahan terbakar hingga Agustus 2026.

- Analisis independen (Greenpeace/ Nusantara Atlas) mengestimasi luas kebakaran mencapai 1,9 juta hektare hingga September 2026.

- Wilayah Terdampak Terparah:
Kebakaran terkonsentrasi di tiga provinsi utama, yaitu Kalimantan Tengah (56.287 titik), Papua Selatan (55.534 titik), dan Sumatera Selatan (19.673 titik).

- Provinsi Prioritas BNPB:
Enam provinsi yang menjadi fokus operasi pemadaman (water bombing) dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

- Provinsi Prioritas BNPB:
Enam provinsi yang menjadi fokus operasi pemadaman (water bombing) dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

